

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pembangunan ekonomi sangat diperlukan oleh suatu negara, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata dengan cara mengembangkan semua kegiatan yang ada di suatu negara tersebut. Perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan kelembagaan (institusi) nasional, merupakan bagian dari proses multidimensial pembangunan. Untuk memenuhi sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok bagi masyarakat, seperti meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi termasuk dalam bagian dari proses pembangunan suatu negara serta merupakan syarat dalam mengurangi kemiskinan. Salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Proses pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, dan apabila terjadi sebaliknya maka proses pembangunan ekonomi akan terhambat. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang paling utama dan bahkan menjadi suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia, merupakan cara mutlak untuk mengejar ketertinggalan mereka dibidang ekonomi dari negara- negara maju. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dari tahun ke tahun maka dapat diartikan negara tersebut memiliki kemajuan di bidang pembangunan. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi akan menentukan keberhasilan pembangunan disuatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan konsep yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan *output* dalam jangka panjang serta penjelasan mengenai bagaimana faktor- faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. *Output* yang dimiliki suatu wilayah yang nantinya digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar wilayah itu sendiri (Boediono, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan perekonomian yang dilihat dari suatu periode ke periode berikutnya diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang semakin meningkat dari suatu period ke periode seterusnya karena faktor- faktor produksi selalu mengalami peningkatan dalam jumlah kualitasnya.

Upaya pembangunan negara yang sedang berkembang ada kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita atau biasanya disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Banyak yang beranggapan bahwa pendapatan masyarakat menjadi obyek pertama yang dilihat untuk membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita riil, dalam artian tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan (setelah dideflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 1997).

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi negara di dukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tiap- tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sama halnya dengan PDB, yang menjadi tolok ukur nilai PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor – faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Nilai PDRB inilah yang akan

menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam Al- Qur'an:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat- Nya) lagi memperkenankan (doa hamba- Nya)”. (Q.S Hud 11:61).

Ayat diatas mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama *al- wujub* atau kewajiban manusia untuk mengelola bumi untuk tujuan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut wajib dan mutlak, kata *al- ‘imarah* (memakmurkan) identik dengan kata *an- tanmiyah al- iqtisadiyah* (pembangunan ekonomi).

Untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu diperlukan indikator penting yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai dari PDRB akan memberikan suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Nilai PDRB yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan nilai constant. Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari kondisi ekonomi daerah tersebut. Adanya peningkatan produksi disutau daerah pada periode waktu tertentu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), PDRB atas dasar harga konstant digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

1. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor- faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah negara (perekonomian domestik).
3. PDRB merupakan salah satu indikator yang dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau tercermin melalui pertumbuhan PDRB.

Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari Negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Tengah merupakan bagian dari ekonomi nasional, sehingga Jawa tengah ikut berperan dalam menunjang keberhasilan ekonomi nasional. Jawa Tengah merupakan salah satu pulau yang terletak dibagian tengah pulau Jawa yang mempunyai 35 Kabupaten/Kota dan memiliki berbagai wilayah dengan latar belakang yang berbeda. Kondisi karakteristik alam, sosial, ekonomi, sumberdaya alam serta sumber daya manusia ini lah yang menjadi perbedaan di setiap wilayah. Perbedaan ini lah yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi.

Keberadaan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk sumber daya yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh terhadap pencapaian hasil- hasil pembangunan ekonomi. Meningkatnya perekonomian masyarakat perekonomian masyarakat disebabkan oleh pembangunan ekonomi di Proinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa nilai PDRB Jawa Tengah relatif rendah. PDRB Jawa Tengah dalam table diatas posisinya selalu berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Rendahnya PDRB Jawa Tengah ini hampir dua kali lipat dari PDRB Jawa Timur dan Jawa Barat sehingga membuat PDRB Jawa Tengah cukup signifikan tertinggalnya. PDRB Jawa Tengah pada Tabel 1 menjelaskan bahwa pada setiap tahunnya PDRB Jawa Tengah mengalami

peningkatan, tetapi masih kalah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	1.222.527	1.296.694	1.373.389	1.454.563	1.540.078
Jawa Barat	1.028.409	1.093.543	1.149.216	1.207.232	1.275.527
Jawa Tengah	691.343	726.655	764.959	806.765	849.313
DIY	71.702	75.627	79.536	83.474	87.688
Jawa Timur	1.124.464	1.192.789	1.262.648	1.331.376	1.405.236
Banten	310.385	331.099	349.351	368.377	387.824

Sumber BPS Indonesia 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sedangkan nilai PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan selama tahun 2011 sampai tahun 2016. Pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar Rp 656.268.129.91 miliar dan sampai pada tahun 2016 PDRB meningkat menjadi sebesar 849.383.564.59 miliar. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,47%. Salah satu tujuan pemerintah daerah melalui upaya memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan perekonomian yang diharapkan akan berdampak secara langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat memiliki sistem keuangan sendiri dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2011-2016

Tahun	PDRB (dalam miliar rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)
2011	656.268.129.91	5,30
2012	691.343.115.96	5,34
2013	726.655.118.06	5,11
2014	764.959.150.95	5,27
2015	806.775.362.19	5,47
2016	849.383.564.59	5,28

Sumber BPS Jawa Tengah 2016

Boediono (1985) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Ada dua sisi yang perlu diperhatikan dari kata perkapita yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh sebab itu penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terikat dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Masalah kependudukan yang timbul bukan hanya karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka berkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Selain itu juga karena beban yang harus di tanggung penduduk usia produktif meningkat (Todaro, 2000).

Tabel 1.3

Perkembangan Jumlah Penduduk di provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2013	33.264.339
2014	33.522.663
2015	33.774.141
2016	34.019.095
2017	34.257.865

Sumber BPS Jateng

Tabel 1.3. jumlah penduduk Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 33.264.339 jiwa dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 33.522.663 jiwa. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 33.774.141 jiwa, kemudian tahun 2016 meingkat kembali sebesar 34.019.095 jiwa dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 34.257.865 jiwa.

Laju ekonomi yang tinggi disuatu Negara akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Tetapi apabila laju ekonomi menurun maka akan berdampak pada sedikitnya kesempatan kerja untuk masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran di negara tersebut.

Tabel 1.4 presentase jumlah tingkat pengangguran terbuka yang ada di Jawa Tengah setiap tahunnya cenderung menurun selama periode 2012-2016, meskipun sempat meningkat 6,01% pada tahun 2013. Pada tahun 2016 menurun menjadi 4,63%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan semakin bertambahnya kesempatan bekerja di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.4

Tingkat Pengangguran Terbuka dalam persen (%)

Tahun	TPT
2012	5,61
2013	6,01
2014	5,68
2015	4,99
2016	4,63

Sumber BPS Jateng 2016

Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan suatu daerah baik secara fasilitator maupun katalisator, membutuhkan saran dan fasilitas pendukung termasuk anggaran belanja dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Seluruh belanja daerah merupakan bentuk dari pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk administrasi pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang berguna untuk pembangunan suatu daerah. Berikut ini adalah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.5

Realisasi Pengeluaran Pemerintah dan Belanja langsung Provinsi Jawa Tengah menurut jenis Belanja (juta rupiah)

Tahun	Pengeluaran pemerintah	Belanja Langsung
2012	11.446.844,10	2.906.831,83
2013	12.724.766,30	3.511.928,59
2014	15.086.065,03	4.439.160,85
2015	17.820.760,49	5.424.696,52
2016	19.354.374,82	6.387.544,77

Sumber BPS Jateng 2016

Pengeluaran pemerintah Jawa tengah yang didalamnya terdapat jumlah total belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah. Total pengeluaran pemerintah dari tahun 2012-2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengeluaran terbesar pada tahun 2016 berjumlah 19.354.374,82 triliun rupiah dan terendah pada tahun 2012 sebesar 11.446.844,10 triliun rupiah. Sedangkan belanja langsung juga mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, tahun 2012 sebesar 2.906.831,83 triliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 6.387.544,77 triliun rupiah. Kondisi ini mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam membangun suatu daerah dan pemerintah daerah menggunakan APBD (anggaran dan pendapatan belanja daerah) yang dikelolanya sebagai instrument vital bagi kebijakan publik di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini mengingat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas, maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh jumlah pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan

belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2017?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah tahun 2013- 2017?
3. Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013- 2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013- 2017.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah tahun 2013- 2017.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah tahun 2013- 2017.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi akademis dalam upaya mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk persiapan di dunia kerja kedepannya.
2. Sebagai gambaran bagi pemerintah provinsi tentang pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.